

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan luar negeri feminis merupakan sebuah konsep kontemporer dalam Hubungan Internasional yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström, pada tahun 2014. Konsep ini lahir dari penggabungan antara teori kebijakan luar negeri dan paradigma feminisme dalam Hubungan Internasional. Kebijakan luar negeri feminis terdiri dari tiga pilar utama, yaitu hak (*rights*), representasi (*representation*), dan sumber daya (*resources*).

Prancis pada tahun 2018 mengumumkan bahwa negara mereka menerapkan kebijakan luar negeri feminis dengan meluncurkan buku pegangan *Stratégie internationale de la France pour l'égalité femmes-hommes* (2018-2022). Kebijakan ini memasukkan nilai-nilai feminis ke dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu untuk melawan kekerasan berbasis gender yang umumnya menimpa perempuan.

Kebijakan luar negeri feminis Prancis memiliki tujuh poin yang hendak direalisasikan terkait perlindungan terhadap kekerasan perempuan, yaitu perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan perempuan dan anak perempuan, penegakkan universalitas hak-hak perempuan, pengakuan secara politik terhadap kekerasan femisida dan perlawanan terhadap segala bentuk femisida, pembentukan undang-undang tentang perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak perempuan, penciptaan kesetaraan hak dan akses terhadap sistem peradilan untuk melawan kekerasan berbasis gender, perlindungan terhadap aktivis yang membela hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, serta peningkatan peran laki-laki dan anak laki-laki dalam mencegah dan menindak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Lima tahun berlalu, kebijakan luar negeri feminis Prancis nyatanya tidak terlaksana dengan baik. Tiga pilar utama dalam kebijakan luar negeri feminis gagal untuk dicapai, di mana Prancis tidak dapat memenuhi hak para perempuan untuk merasa aman dari segala bentuk kekerasan dan ancaman

kekerasan berbasis gender, tidak dapat menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di lingkup masyarakat dan pemerintahan, serta tidak dapat memfasilitasi segala bentuk kegiatan, program, dan organisasi feminis di tingkat domestik dan regional secara finansial.

Kegagalan Pemerintah Prancis untuk memenuhi pilar kebijakan luar negeri feminis menandakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan luar negeri feminis jika memang ingin mewujudkan kesetaraan gender di tingkat domestik dan regional. Evaluasi tersebut mencakup perbaikan regulasi kebijakan, perbaikan sistem pendanaan, perbaikan struktur pemerintahan, perbaikan hubungan kerja sama Uni Eropa, dan perbaikan keterlibatan aktor.

Seluruh evaluasi tersebut bersumber dari satu hal, yaitu budaya patriarki yang masih melekat di keseharian masyarakat Prancis dan Uni Eropa. Patriarki mewajarkan adanya kekerasan berbasis gender akibat dominasi dan kontrol yang dimiliki laki-laki terhadap perempuan. Patriarki dalam hal ini berhasil memengaruhi regulasi kebijakan, sistem pendanaan, struktur pemerintahan, hubungan kerja sama Uni Eropa, dan aktor yang terlibat dalam kebijakan.

Inkonsistensi Pemerintah Prancis dalam *Stratégie internationale de la France pour l'égalité femmes-hommes* (2018-2022) dapat dijumpai ketika kebijakan luar negeri feminis yang seharusnya bertujuan untuk menghapus patriarki justru malah dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dalam penerapannya. Sebagai dampaknya, kekerasan berbasis gender masih sangat sering terjadi dan kesetaraan gender sangat sulit untuk diwujudkan selama kebijakan dan hukum yang direformasi oleh pemerintah masih mengandung unsur patriarki.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

1. Pemerintah Prancis dapat menerapkan kebijakan luar negeri feminis yang bebas dari pengaruh patriarki.
2. Pemerintah Prancis dapat melakukan reformasi terhadap kebijakan dan hukum yang masih bertentangan dengan nilai-nilai feminis.

6.2.2 Saran Teoritis

1. Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai kebijakan luar negeri feminis dan pengaruh implementasinya terhadap kebijakan domestik, regional, maupun internasional.
2. Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam terkait kebijakan luar negeri feminis oleh Prancis dan pengaruhnya terhadap Uni Eropa.